



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(*REVENGE PORN*)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD RIZKY SEPTIADI SANTOSO
1910611016**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (*REVENGE PORN*)

MUHAMMAD RIZKY SEPTIADI SANTOSO

1910611016

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Juni 2023

Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H, M.H

NIP. 199110132022031006

NIP. 197201271021211003



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM
PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Rizky Septiadi Santoso

NPM : 1910611016

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial (*REVENGE PORN*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H

Anggota 1

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.

Anggota 2

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H



Dekan

Dr. Suherman, SH., LL.M.

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan Hukum yang berlaku.

N a m a : Muhammad Rizky Septiadi Santoso

N.I.M : 1910611016

Tanggal : 20 Juli 2023

Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizky Septiadi Santoso
NIM/NPM : 1910611016
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum*)
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Penyebaran Konten Pornography di
Media Sosial (Revenge Porn)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum-Hukum*~~) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas RoyaltiNoneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK-SETUJU*~~) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum-Hukum*~~) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA*~~) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum-Hukum*~~) untuk dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Rizky Septiadi Santoso

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya atas kesempatan kepada penulis untuk berkarya dan melengkapi naskah tugas akhir berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornography di Media Sosial (Revenge Porn)**", Skripsi ini disiapkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Untuk alasan ini, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kelengkapan naskah, sehingga penulis bisa lebih baik dalam menulis karya ilmiah lainnya, dan juga Penulis berterimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, moral dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan kepada saudara Penulis atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
4. Bapak Kayus Kayowuan L, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Arinal Achsana yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam memberikan masukan, saran dalam keberlangsungan skripsi ini.

7. Ahwal, Fauzan, Eko, dan Bagas sebagai teman dekat Penulis selama menjalani masa perkuliahan yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan, serta berbagi informasi dengan Penulis.
8. Semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah salah satu bentuk *cybercrime*, artinya dalam hal ini kegiatan *revenge porn* merupakan perbuatan tercela dengan substansi seksual berbasis *online* dengan mengancam korban. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Faktor-faktor tersebut antara lain; belum efektifnya payung hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku dalam menangani tindakan pornografi balas dendam atau fenomena *revenge porn* ini, Kurangnya pemahaman gender dari Penegak Hukum, Budaya patriarki yang masih melekat kuat bagi masyarakat Indonesia, Penanganan yang sering mengakibatkan *boomerang* bagi sang korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum. 2. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) saat ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kata Kunci:

Penegakan hukum, pelaku penyebaran, konten pornografi, media sosial

ABSTRACT

Terror that threatens, the right to choose religion and belief is a fact that often befalls people around the world. The right to defend, as well as the right to choose a religion of belief is indeed a right for all people in all parts of the world. choosing a religion of belief is crucial to achieving peace and stability in all parts of the world, as happened on March 15, 2019, the world was shocked by the horrific shooting terror at two mosques in New Zealand. The perpetrator Brenton Harrison Tarrant (28) viciously opened fire on the congregation of the mosque who were praying Friday. This incident took place at the Al Noor Mosque and the Linwood Mosque in Christchurch, New Zealand. In this case the author will discuss what is the topic raised by the author, namely the element of human rights violations from the shooting action in the form of a violation of Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the treatment of the perpetrators which includes the crime of genocide, then also how the Prime Minister of Zealand recently carried out diplomatic efforts in the form of Alternative Dispute Resolution (ADR) between countries whose citizens became victims in the case. This was deemed successful because the Prime Minister of New Zealand was able to prevent inter-religious conflicts between worlds, and explained to the whole world that we must eliminate the attitude of Islamophobia, or fear of Muslims who are considered terrorists, but in fact it is a wrong teaching and Islam is not the same once taught about acts of Terrorism.

Keyword:

Law enforcement, distribution operators, pornographic content, social media

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Literature Review	9
B. Tinjauan Teori	11
C. Tinjauan Umum	15
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	
A. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornography (Revenge Porn)	27
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi di Media Sosial (Revenge Porn)	36
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Faktor penyebab terjadinya penyebaran konten pornografi (revenge porn) dimedia sosial	44
B. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi (<i>revenge porn</i>) dimedia sosial	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN